



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Kementerian PPN/
Bappenas

Terpercaya sebagai Indikator Keberlanjutan Daerah: Rakortek KUTIM

USAID SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL
GOVERNANCE ACROSS REGIONS (SEGAR)

13 Oktober 2022

Agenda



Memahami Indikator Terpercaya



Mempersiapkan Peta Jalan Implementasi Terpercaya Kutim

Identifikasi aktivitas dan inisiatif yang
sudah berjalan

Identifikasi pihak dan pendukung Kutim

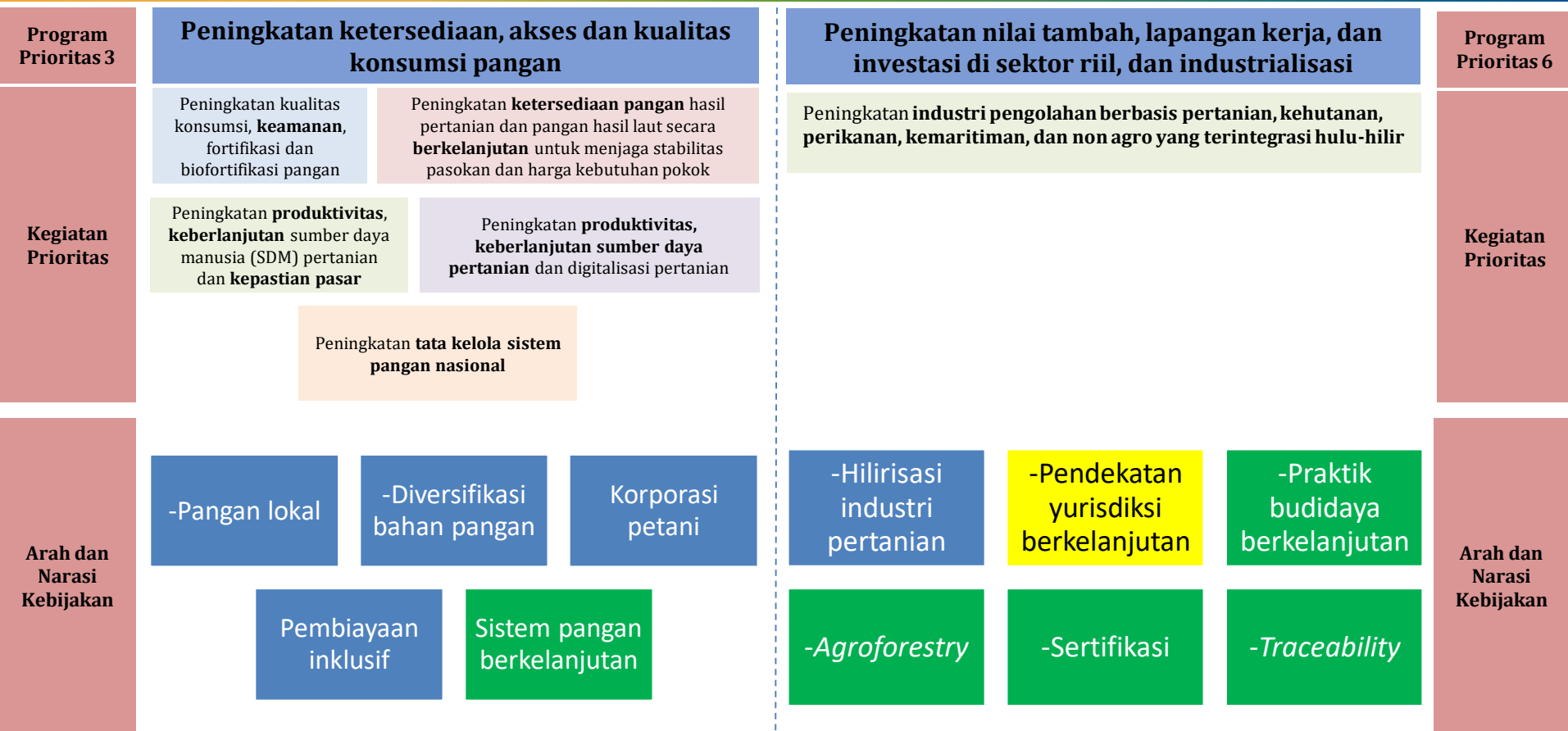


Mempersiapkan Materi Peluncuran 11 November

Highlights dari komitmen dan rencana

I. Pengenalan Terpercaya

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 (PERPRES 18/2020) TENTANG KEBERLANJUTAN BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN





TERPERCAYA:

PENDEKATAN YURISDIKSI - MEMPROMOSIKAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Pilar Lingkungan

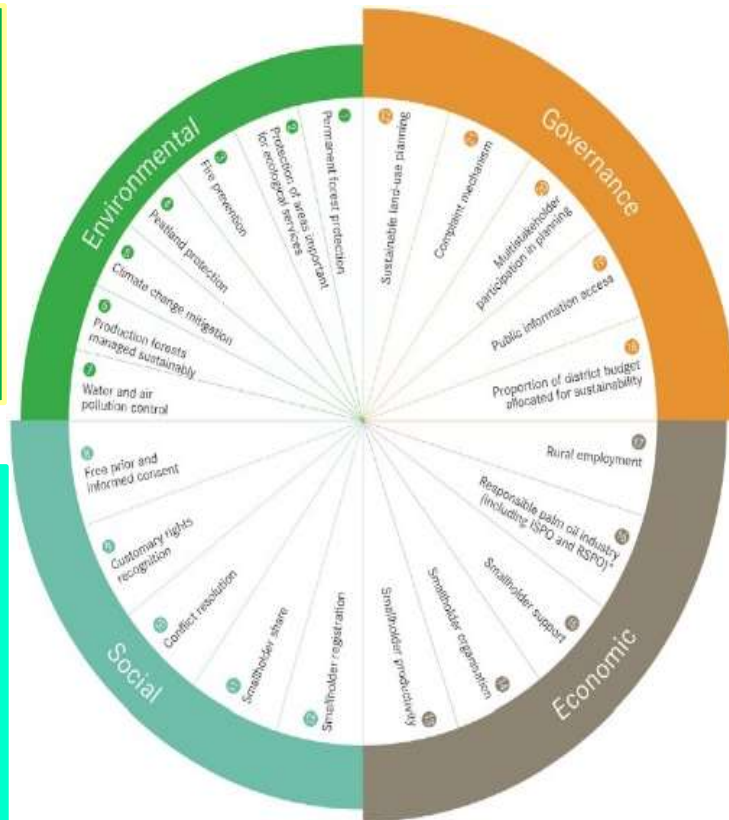
1. Perlindungan Hutan Permanen
2. Perlindungan area yang penting untuk jasa lingkungan
3. Pencegahan kebakaran
4. Perlindungan lahan gambut
5. Mitigasi Perubahan Iklim
6. Menejemen Keberlanjutan

Hutan Produksi

7. Kualitas LH (Air dan Udara)

Pilar Sosial

1. Free Prior and Informed Consent (FPIC)
2. Perlindungan Tanah Adat
3. Resolusi Konflik
4. Proporsi lahan petani untuk lahan perkebunan
5. Registrasi Petani (STDB)
6. Food Security Index (IKP)



Pilar Tata Kelola

1. Akses atas informasi publik
2. Partisipasi Multi-pihak pada perencanaan kabupaten
3. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan
4. Perencanaan Penggunaan Lahan Secara Berkelanjutan

Pilar Ekonomi

1. Produktivitas Petani
2. Jumlah Kelomok Tani
3. Jumlah Penyuluh
4. Perkebunan tersertifikasi
5. Tingkat Kemiskinan
6. Proporsi anggaran APBD untuk keberlanjutan

Pendahuluan

Inisiatif Terpercaya **dimulai tahun 2018** oleh Bappenas didukung European Forest Institute (EFI) dan Inobu.


Kementerian Pembangunan Nasional (BAPPENAS) saat ini memimpin upaya untuk memastikan bahwa Sistem Terpercaya **terintegrasi penuh ke dalam sistem perencanaan nasional**, USAID SEGAR mendukung Bappenas dan Pemda untuk mengimplementasikan Terpercaya.

Terpercaya adalah sistem pemerintah, sehingga datanya dari pemerintah tetapi sudah disesuaikan dengan persyaratan sertifikasi komoditas.




Terpercaya **BUKAN:**


- Skema Sertifikasi
- Mengganti sertifikasi yang ada



Terpercaya mengukur dan memverifikasi kinerja keberlanjutan di Tingkat Kabupaten

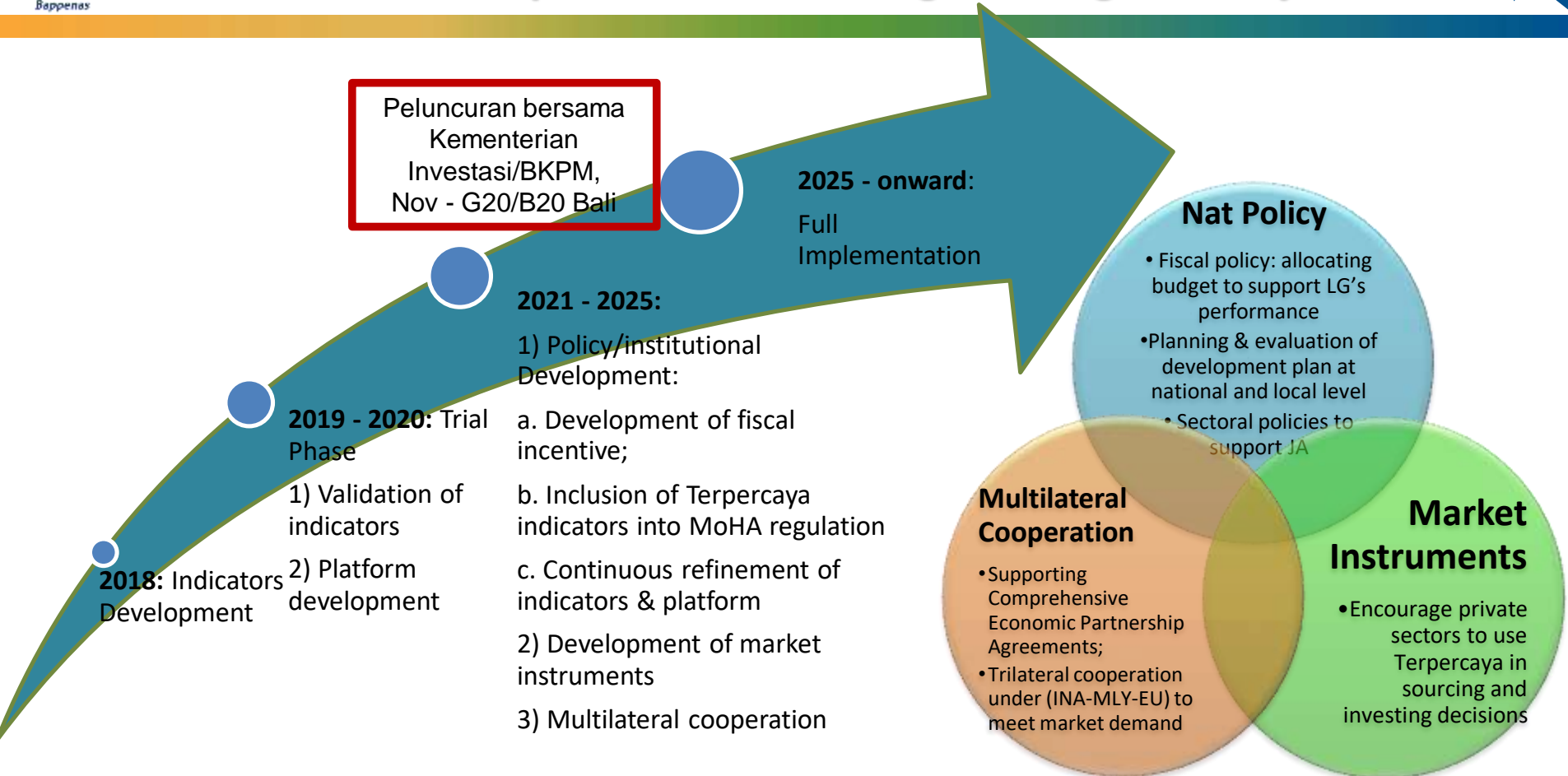


Terpercaya mendukung pemenuhan skema sertifikasi melalui Pendekatan Yurisdiksi



Terpercaya membawa SDGs dan kesepakatan internasional lainnya tentang keberlanjutan ke level daerah

Tata Waktu Implementasi & Pengembangan Kebijakan



Perkembangan Implementasi Terpercaya di 12 Kabupaten SEGAR

Pengumpulan Data

- Periode pengumpulan data (**Des 2021 – Maret 2022**).
- Dilakukan 3 Local Assessor di tiap Provinsi: Kaltim (Dr. Emi Purwanti, UnMul)
- Pengumpulan data dilakukan dengan **pengajuan surat dan interview** Dinas terkait.
- Data yang diperoleh disimpan di dalam Data Entry Form internal untuk analisa.

Analisa

- Analisa Indikator Terpercaya menggunakan basis **formulasi pada Pedoman Terpercaya VI**
- Grading (A,B,C) per indikator dilakukan dengan membandingkan indikator kabupaten dengan **rata-rata dari kedua belas kabupaten dampingan SEGAR**
- Analisa juga mempertimbangkan **ketersediaan data** di daerah

Perkembangan

- Berdasarkan masukan, termasuk dari proses uji coba di kabupaten dampingan SEGAR, dihasilkan **indikator V2** pada September 2022
- **Peluncuran Terpercaya** Bali di B20 Forum, Bappenas bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN

Ketersediaan Data di Kabupaten SEGAR

| Data | Indikator | Provinsi Aceh | | | Provinsi Kalimantan Timur | | | Provinsi Kalimantan Barat | | | | Provinsi Kalimantan Tengah | | Σo | Σx | Σn | Persentase Ketersediaan (o) |
|----------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|---------|---------|----------|----------------------------|--------------------|----|----|----|-----------------------------|
| | | Aceh Tamiang | Aceh Timur | Aceh Utara | Kutai Timur | Berau | Mahakam Hulu | Kubu Raya | Sanggau | Sintang | Ketapang | Seruyan | Kotawaringin Barat | | | | |
| RTRW | 01.02.04 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Emisi | 5 | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | o | o | 10 | 2 | 0 | 83% |
| IKA/U | 7 | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | o | o | 10 | 2 | 0 | 83% |
| SOP PADIATAPA/ FPIC | 8 | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 9 | 0 | 25% |
| Registrasi Konflik | 10 | x | x | x | o | n | x | o | x | o | x | o | o | 5 | 6 | 1 | 42% |
| Petani STDB | 12 | o | x | x | o | n | x | o | x | o | o | o | o | 7 | 4 | 1 | 58% |
| RSPO-ISPO | 16 | x | o | x | o | n | x | o | x | o | o | o | o | 7 | 4 | 1 | 58% |
| SOP partisipasi masyarakat | 20 | o | o | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | 10 | 2 | 0 | 83% |
| SOP mekanisme pengaduan | 21 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 12 | 0 | 0 | 100% |
| RPPLH-DDDTLH | 22 | o | o | o | x | x | x | x | x | o | n | o | o | 6 | 5 | 1 | 50% |

Keterangan:

O = Tersedia

X = Tidak Tersedia

N = Data mungkin tersedia, tapi belum diperoleh saat pengumpulan data dilakukan

Indikator I. Perlindungan Untuk Hutan Tetap (skema I)

$$HP_1(\%) = \frac{(\text{"\#_}\$ \% _ \$ \& _})}{'()^*!} \times 100\%$$

HL_i : total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektar)

HK_i : total luas Hutan Konservasi di kabupaten i
(hektar)

M_i : total luas di bawah moratorium lisensi baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektar), di luar HL_i dan HK_i

$Area_i$: total luas Kabupaten i (hektar)

- ✓ RTRW Kabupaten – data daerah
- ✓ PIPPIB 2020 periode I - KLHK

Notes:

PIPPIB terbaru = 2021 periode 2



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata



Tujuan: untuk memantau seberapa jauh komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan yang seharusnya dilindungi dan dipertahankan kondisi tutupan hutannya baik di tataran kebijakan maupun secara faktual.

Indikator I. Perlindungan Untuk Hutan Tetap (skema 2)

$$HP_i(\%) = \frac{(\text{"\#_i\$"%_i\$&_i})}{'() * _ , * - !} \times 100\%$$

HL_i : total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektar)

HK_i : total luas Hutan Konservasi di kabupaten i (hektar)

M_i : total luas di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar HL(i) dan HK(i)

$Area_{kab_i}$: Luas HK_i dan HL_i dalam RTRWK

- ✓ **RTRW Kabupaten – data daerah**
- ✓ **PIPIB 2020 periode 1 - KLHK**

Notes:

PIPIB terbaru = 2021 periode 2

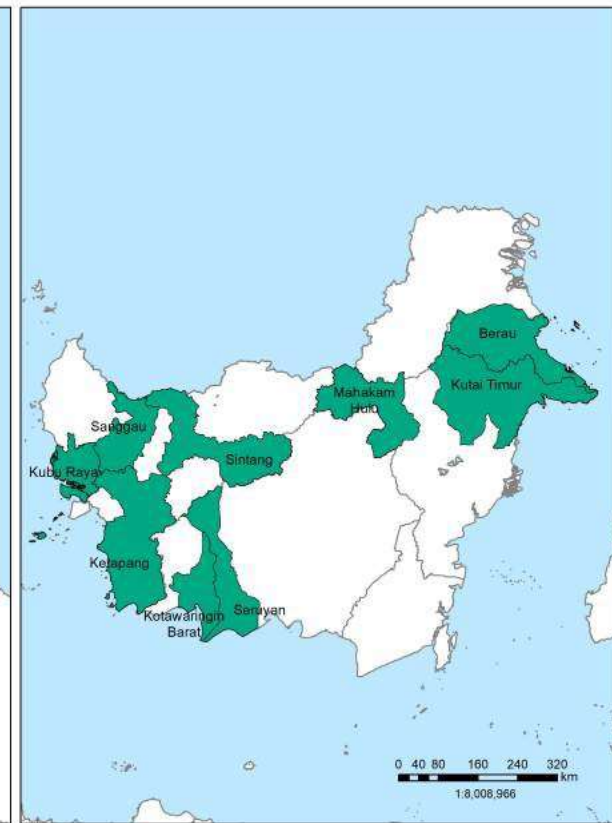


Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata



Indikator 1. Perlindungan Untuk Hutan Tetap (Opsional)

$$HP_i(\%) = \frac{(\frac{HL_i + HK_i}{M_i})}{Area_i} \times 100\%$$

HL_i : total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektar)

HK_i : total luas Hutan Konservasi di kabupaten i (hektar)

M_i : total luas di bawah moratorium lisensi baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektar), di luar HL_i dan HK_i

$Area_i$: total luas Kabupaten i (hektar)

Note: memerlukan *benchmark* per kabupaten berapa persen luas HK_i dan HL_i yang ideal dalam satu kabupaten

$$HP_i(\%) = \frac{(\frac{HL_i + HK_i}{M_i})}{Area_i} \times 100\%$$

HL_i : total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektar)

HK_i : total luas Hutan Konservasi di kabupaten i (hektar)

M_i : total luas di bawah moratorium lisensi baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektar), di luar HL_i dan HK_i

$Area_i$: total luas HK_i dan HL_i di dalam RTRWK

Note: Ketersediaan RTRWK yang terpusat di tingkat Nasional. Kompilasi sudah tersedia, tetapi shp belum tersedia di tingkat nasional.

Penyebut akan selalu lebih besar dari pembilang

Indikator 2. Perlindungan untuk area yang penting untuk layanan ekologi

$$ESP_i(\%) = \frac{(\frac{. / . 0 \# _ i}{\%11_i})}{\%11_i} \times 100\%$$

$RTRWL_i$: total luas RTRWK dengan fungsi lindung di kabupaten i (hektar)

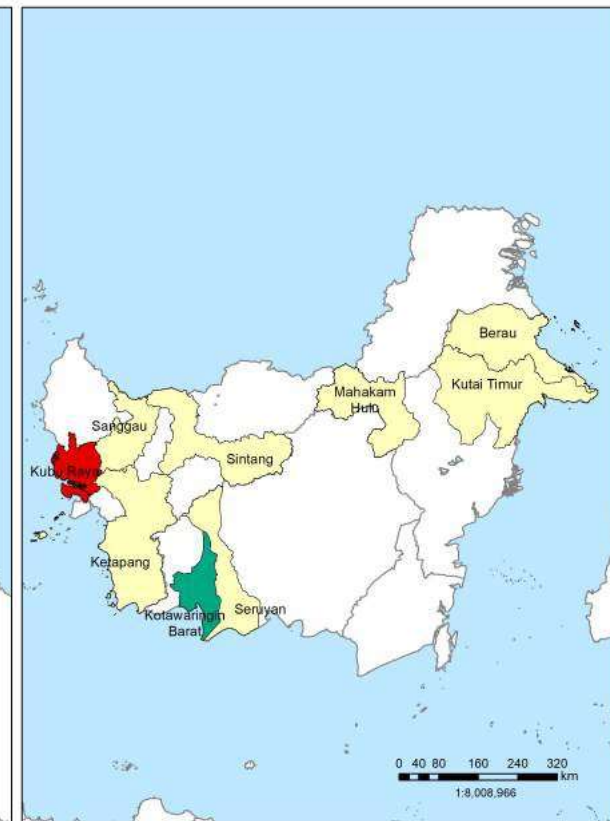
KEE_i : total luas Kawasan Ekosistem Esensial di kabupaten i (hektar) → tidak hanya hutan

- ✓ **RTRW Kabupaten – data daerah**
- ✓ **KEE dalam data Potensi Kehati Tinggi 2019 - KLHK**



Nilai:

- A – Hijau: di atas rata-rata
- B – Kuning: pada rata-rata
- C – Merah: di bawah rata-rata



Tujuan: Untuk menilai kinerja pemerintah dalam menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan dalam kaitannya dengan penyebab deforestasi dan degradasi hutan serta penghasil gas rumah kaca

Indikator 3: Pencegahan Kebakaran

$$\Delta FS_{23} = FS_{23} - FS_{24}$$

FS_{23} : Luas kebakaran (ha) kabupaten i pada tahun t

FS_{24} : Luas kebakaran (ha) kabupaten i pada tahun baseline b

✓ Peta kebakaran 2018-2019 – KLHK

Notes:

Data kebakaran terbaru = 2020



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata



Tujuan: Untuk menilai kinerja pemerintah dalam menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan dalam kaitannya dengan penyebab deforestasi dan degradasi hutan serta penghasil gas rumah kaca

Indikator 4: Perlindungan untuk lahan gambut (skema I)

$$HP_i(\%) = \frac{(\text{"\#\$ \% ' () "\#\$ \% '* () "\#\$ \% + !})}{\text{"\#\$ \% _ \$, \# \$!}} \times 100\%$$

Peat_HL_i: total luas lahan gambut di hutan lindung di kabupaten i (hektar)

Peat_HK_i: total luas lahan gambut (ha) di hutan konservasi

Peat_M_i: total luas lahan gambut di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar *Peat_HL_i* dan *Peat_HK_i*

Peat_area_i: total luas gambut dengan fungsi lindung (hektar)

- ✓ **RTRW Kabupaten – data daerah**
- ✓ **PIPIB 2020 periode I – KLHK**
- ✓ **Kesatuan Hidrologis Gambut 2017 – KLHK**
- ✓ **Fungsi Ekosistem Gambut – KLHK**



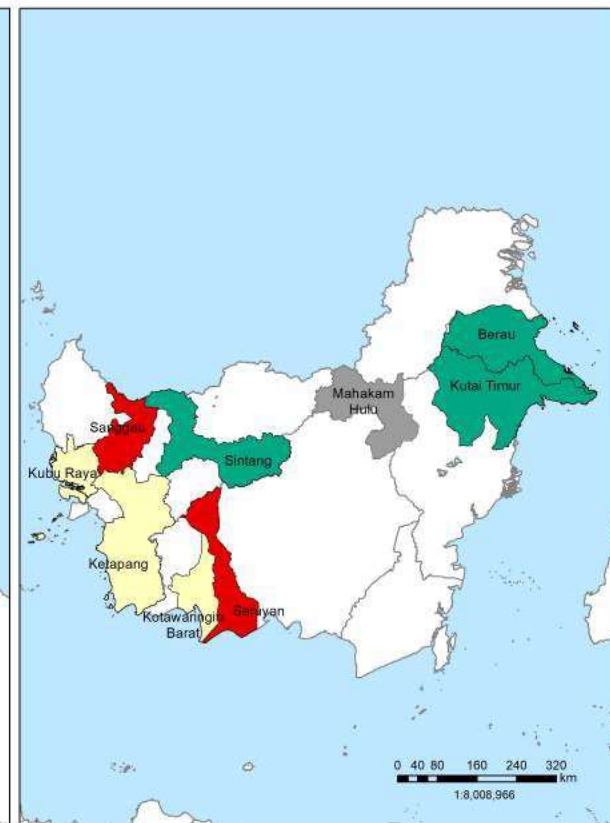
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada gambut



Tujuan: untuk memantau upaya pemerintah daerah di dalam melindungi lahan gambut.

Indikator 4: Perlindungan untuk lahan gambut (skema 2)

$$HP_i(\%) = \frac{(\text{"\#\$% ' () "\#\$% '* () "\#\$% + ! })}{\text{"\#\$% - \$. ! }} \times 100\%$$

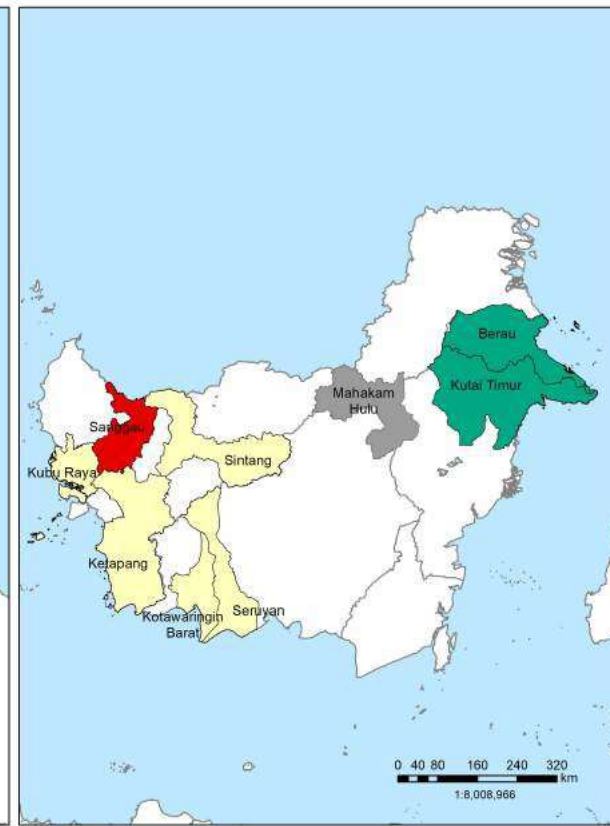
$Peat_{HL}_i$: total luas lahan gambut di hutan lindung di kabupaten i (hektar)

$Peat_{HK}_i$: total luas lahan gambut di hutan konservasi di kabupaten (hektar)

$Peat_{M}_i$: total luas lahan gambut di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar $Peat_{HL}_i$ dan $Peat_{HK}_i$

$Peat_{kab}_i$: total luas gambut kabupaten (hektar)

- ✓ **RTRW Kabupaten – data daerah**
- ✓ **PIPIB 2020 periode I – KLHK**
- ✓ **Kesatuan Hidrologis Gambut 2017 – KLHK**



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada gambut

Indikator 4: Perlindungan untuk lahan gambut (skema 3)

$$HP_i(\%) = \frac{((\text{"\#\$ \% ' () (" \# \$ \% ' * () (" \# \$ \% + () (" \# \$ \% - \$. !}) \times 100\%$$

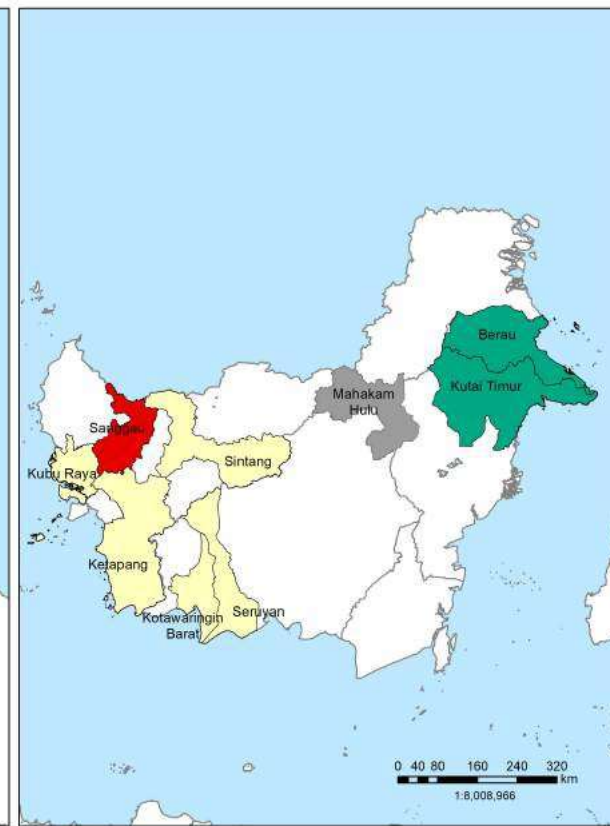
$L_{Peat_HL_i}$: total luas lahan gambut di hutan lindung (gambut yang punya fungsi lindung) di kabupaten i (hektar)

$L_{Peat_HK_i}$: total luas lahan gambut di hutan konservasi (gambut yang punya fungsi lindung) di kabupaten (hektar)

$Peat_M_i$: total luas lahan gambut di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar $L_{Peat_HL_i}$ dan $L_{Peat_HK_i}$

$Peat_kab_i$: total luas gambut dengan fungsi lindung (hektar)

- ✓ **RTRW Kabupaten – data daerah**
- ✓ **PIPIB 2020 periode I – KLHK**
- ✓ **Kesatuan Hidrologis Gambut 2017 – KLHK**



Indikator 4: Perlindungan untuk lahan gambut

$$HP_n(\%) = \frac{(\text{Peat_HL}_i + \text{Peat_HK}_i + \text{Peat_M}_i + \text{Peat_kab}_i)}{\text{Peat_HL}_i + \text{Peat_HK}_i + \text{Peat_M}_i + \text{Peat_kab}_i} \times 100\%$$

Peat_HL_i: total luas lahan gambut di hutan lindung di kabupaten i (hektar)

Peat_HK_i: total luas lahan gambut di hutan konservasi di kabupaten i (hektar)

Peat_M_i: total luas lahan gambut di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar *Peat_HL_i* dan *Peat_HK_i*

Peat_kab_i: total luas gambut dengan fungsi lindung di kabupaten i (hektar)

Skema 1

$$HP_n(\%) = \frac{(\text{Peat_HL}_i + \text{Peat_HK}_i + \text{Peat_M}_i + \text{Peat_kab}_i)}{\text{Peat_HL}_i + \text{Peat_HK}_i + \text{Peat_M}_i + \text{Peat_kab}_i} \times 100\%$$

Peat_HL_i: total luas lahan gambut di hutan lindung di kabupaten i (hektar)

Peat_HK_i: total luas lahan gambut di hutan konservasi di kabupaten i (hektar)

Peat_M_i: total luas lahan gambut di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar *Peat_HL_i* dan *Peat_HK_i*

Peat_kab_i: total luas gambut kabupaten i (hektar)

Skema 2

$$HP_n(\%) = \frac{(\text{Peat_HL}_i + \text{Peat_HK}_i + \text{Peat_M}_i + \text{Peat_kab}_i)}{\text{Peat_HL}_i + \text{Peat_HK}_i + \text{Peat_M}_i + \text{Peat_kab}_i} \times 100\%$$

Peat_HL_i: total luas lahan gambut yang memiliki fungsi lindung di hutan lindung di kabupaten i (hektar)

Peat_HK_i: total luas lahan gambut yang memiliki fungsi lindung di hutan konservasi di kabupaten i (hektar)

Peat_M_i: total luas lahan gambut memiliki fungsi lindung di bawah moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten i (hektar), di luar *Peat_HL_i* dan *Peat_HK_i*

Peat_kab_i: total luas gambut dengan fungsi lindung di kabupaten i (hektar)

Skema 3

Indikator 5. Mitigasi Perubahan Iklim

$$EDefRel\ Ratio_i(\%) = \frac{(15)67(1)}{8.1\#_i} \times 100\%$$

$EDefor_i$: total emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahunan di i pada tahun t (ton CO₂)

$FREL_i$:Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi

Hutan ($FREL$) kabupaten i (ton CO₂) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- ✓ **Emisi deforestasi – data daerah**
- ✓ **FREL Kabupaten – KLHK**

Notes:

FREL periode terbaru belum dipublikasikan.
Pada periode FREL 2020, hanya ada sampai tingkat Provinsi

Pertanyaan mendasar:

- Apakah data emisi deforestasi tersedia di nasional per kabupaten?
- Ketika data FREL dipublikasikan, bagaimana menurunkan perhitungan sampai ke tingkat kabupaten?

Tujuan: untuk memantau tingkat emisi karbon dioksida yang dihasilkan kabupaten dari sektor hutan dan lahan, dengan proxy deforestasi dan degradasi hutan yang dibandingkan dengan emisi acuan

Indikator 6. Pengelolaan hutan produksi lestari

$$SHP Ratio_i(\%) = \frac{(987(7;1))}{<_i} \times 100\%$$

$SForcon_i$: total konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten i (hektar)

HP_i : total **konsesi** hutan produksi di kabupaten i (hektar)

- ✓ **Peta konsesi hutan produksi 2019 – KLHK**
- ✓ **Sertifikasi PHPL - KLHK (diunduh tahun 2021 (<https://phl.menlhk.go.id/>))**



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata



Tujuan: untuk memantau jumlah konsesi hutan produksi yang telah memiliki IUPPHK dan memiliki sertifikasi berkelanjutan baik dalam skema FSC maupun PHPL

Indikator 7. Pengendalian pencemaran air dan udara

$$AWPC_i = (50\% \times WQ_i) + (50\% \times AQ_i)$$

WQ_i : Indeks kualitas air (IKA)

AQ_i : Indeks kualitas udara (IKU)

- ✓ **IKA/U 2021 – data daerah (Aceh Tamiang, Aceh Utara, Kubu Raya, Sanggau)**
- ✓ **IKA/U 2020 – data daerah (Ketapang, Berau, Mahulu)**
- ✓ **IKA/U 2019 – data daerah (Kobar, Seruyan)**
- ✓ **IKA/U 2018 – data daerah (Kutim)**



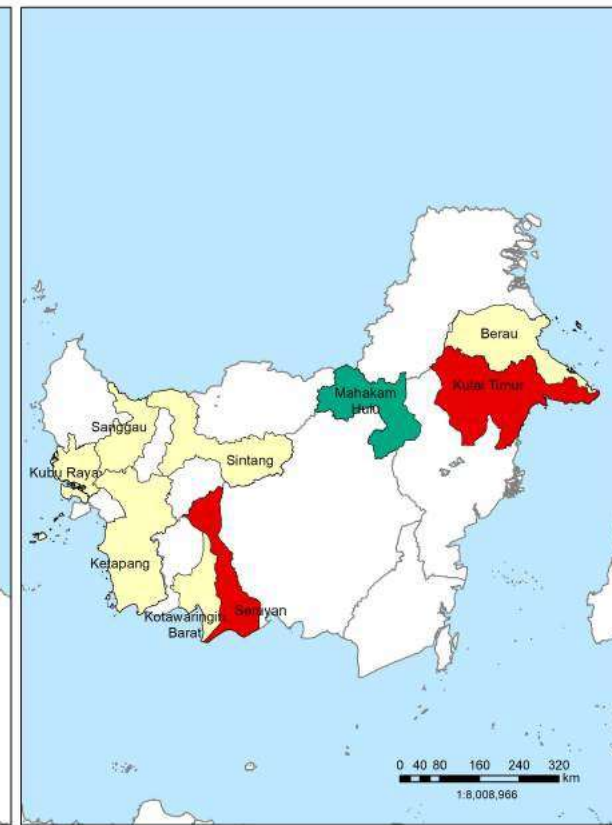
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk melihat kualitas air dan udara di suatu yurisdiksi dalam rangka memastikan bahwa kegiatan perkebunan tidak membawa dampak lingkungan yang buruk bagi masyarakat lokal

Indikator 8. Padiatapa/FPIC dalam proses pengajuan izin perkebunan

$$FPIC_i \in \{0,1\}$$

$FPIC_i$ sama dengan 1 jika terdapat SOP di kabupaten i untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan, dan 0 jika sebaliknya

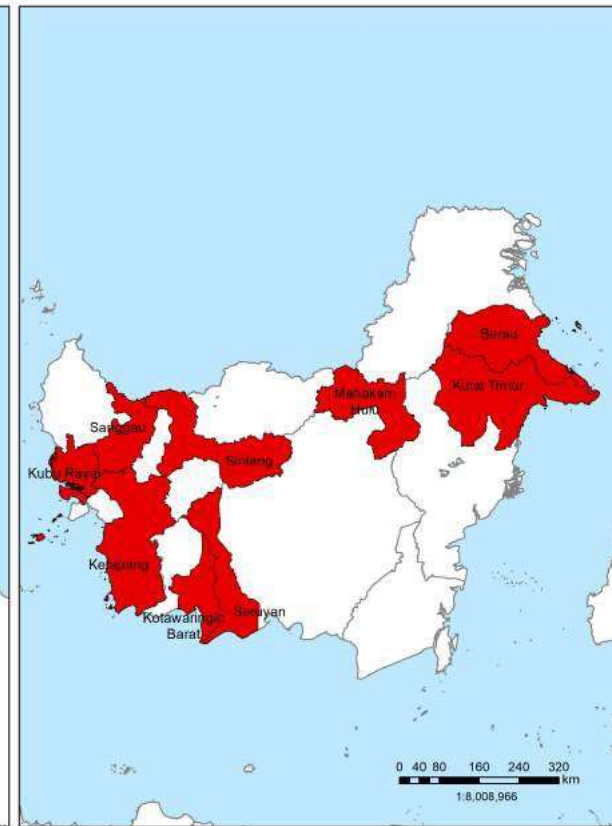
✓ **SOP FPIC – data daerah**



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata



Tujuan: untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak setiap orang untuk berpartisipasi atas kegiatan yang akan membawa dampak terhadap diri dan/atau lingkungannya

Indikator 9. Pengakuan terhadap tanah adat (skema I)

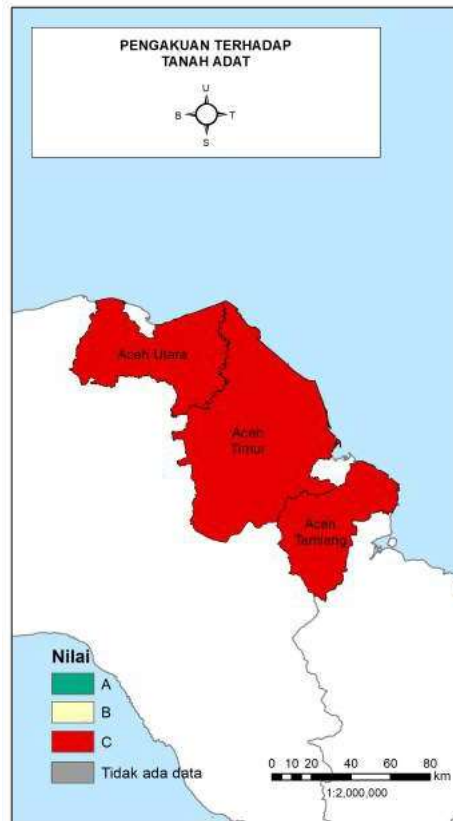
$$CL_i \in \{0,1\}$$

CL_i sama dengan 1 jika kabupaten i memiliki tanah adat yang telah diakui berdasarkan SK/Perda Bupati, dan 0 sebaliknya.

✓ Data Hutan Adat – KLHK

Note:

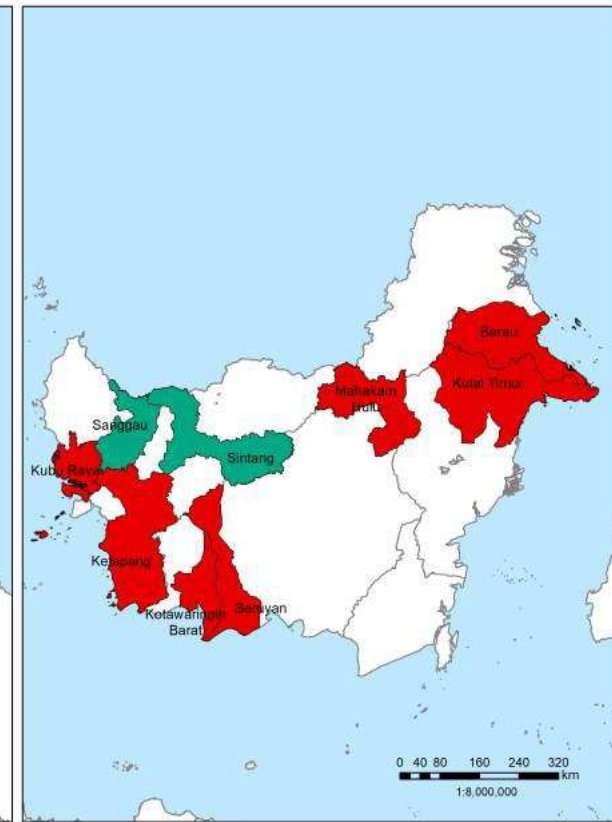
Ke depan, direncanakan untuk mengukur pengakuan terhadap tanah adat dengan melihat Luas tanah adat yang sudah diakui berdasarkan SK/Perda Bupati (hektar) dan Luas potensi tanah adat (hektar).



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata



Tujuan: untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat yang telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator 10. Resolusi konflik

$$RK(\%) = \frac{konflik_{kab_i} - 7,6}{konflik_{all_{kab_i}} - 7,6} \times 100\%$$

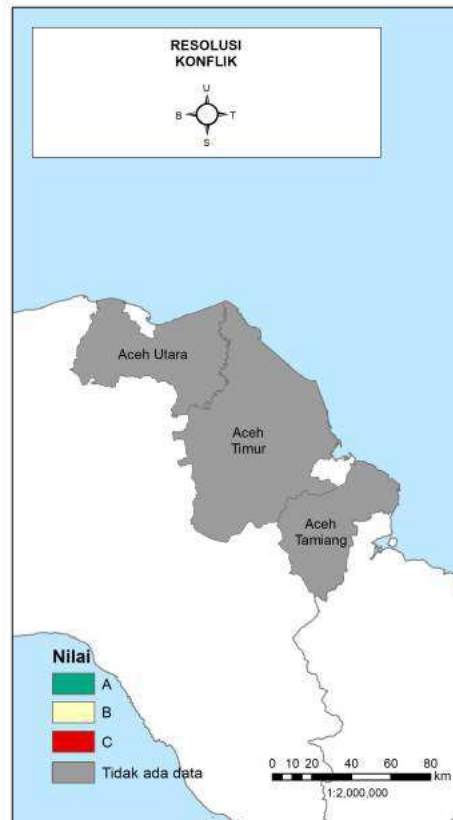
$konflik_{kab_i}$: Jumlah konflik perkebunan kabupaten i

$konflik_{all_{kab_i}}$: Jumlah konflik perkebunan di 12 kabupaten SEGAR

- ✓ **GUP 2021 – data daerah (Kubu Raya)**
- ✓ **GUP 2019 – data daerah (Kobar, Seruyan)**
- ✓ **GUP tanpa tahun – data daerah (Sintang, Kutim)**

Note:

Datanya tidak tersedia tahunan di masing2 kabupaten, di data nasional hanya tersedia 40 kabupaten (kabupaten SEGAR tidak termasuk)



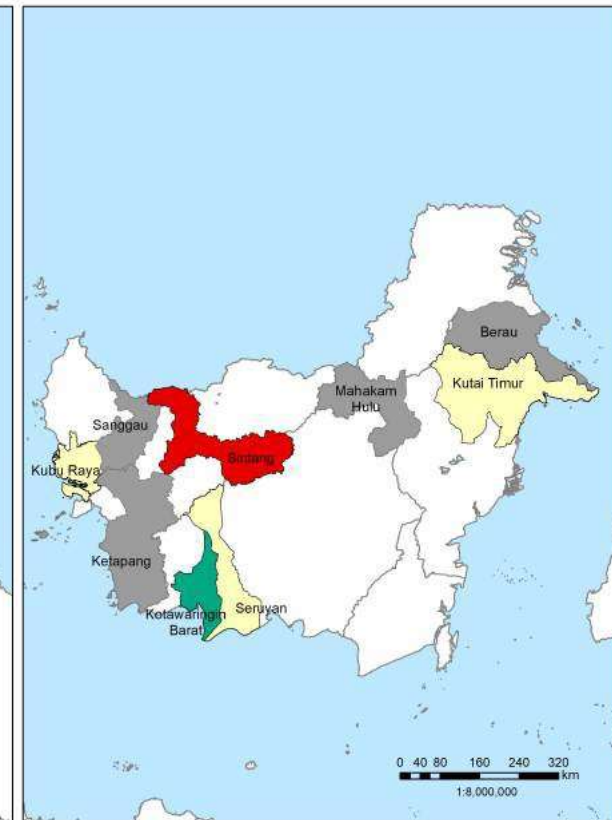
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial terkait dengan pembangunan perkebunan di yurisdiksinya.

Indikator 11. Prosentase untuk petani swadaya

$$sholder_i(\%) = \frac{sh. area_i}{plantation_i} \times 100\%$$

$sh. area_i$: total luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten i (hektar).

$plantation_i$: total luas perkebunan di kabupaten i (hektar)

- ✓ **Statistik Perkebunan Indonesia 2019-2021 (perkebunan petani swadaya) dan 2017-2019 (perkebunan swasta dan negara) – Kementan**

Note:

Petani swadaya adalah petani mandiri (non-plasma)



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengamati besarnya keterlibatan petani kecil di sektor perkebunan dalam suatu kabupaten.

Indikator 12. Pendaftaran petani swadaya

$$sholder_i(\%) = \frac{sh.stdb_i}{sh_i} \times 100\%$$

$sh.stdb_i$: total jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten i (count)

sh_i : total jumlah petani swadaya di kabupaten i (count).

- ✓ **Statistik Perkebunan Indonesia 2019-2021 (perkebunan petani swadaya) dan 2017-2019 (perkebunan staswa dan negara) – Kementan**
- ✓ **STDB – data daerah**



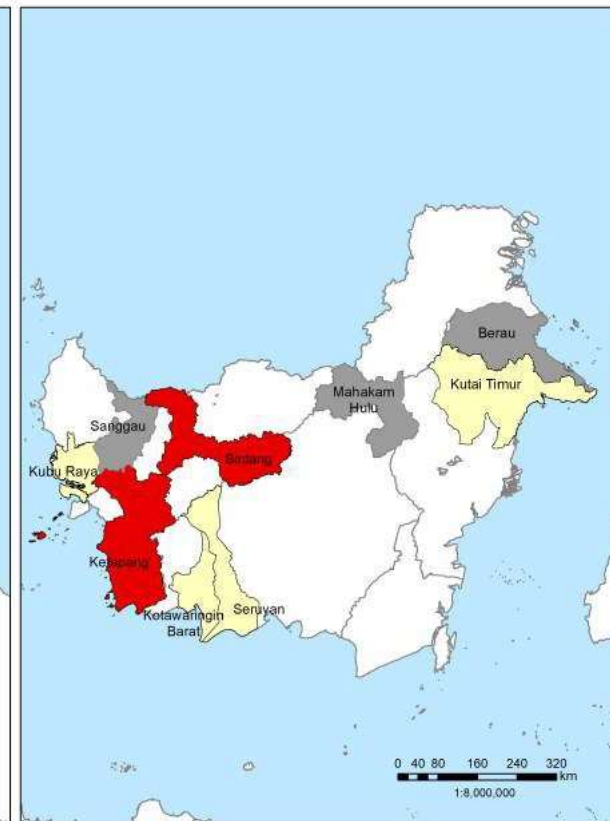
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi petani kecil untuk mengambil bagian dalam rantai pasok berkelanjutan.

Indikator 13. Produktivitas petani swadaya

$$sh.prod_i = \frac{"\#.\%!\&'(1}{"\#.)*\&)1}$$

$sh.yield_i$: produksi petani sawit kabupaten i (kg).

$sh.area_i$: area perkebunan yang dikelola oleh petani kabupaten i (ha).

✓ **Statistik perkebunan Indonesia 2018-2020 – Kementan**



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data

Tujuan: untuk mengamati produktivitas petani kecil, khususnya kelapa sawit di kabupaten

Indikator I4: Jumlah asosiasi per kelompok petani swadaya

$$Plant.FG_i = \frac{Plant.G_i}{Plant.F_i} \times 1000$$

Plant. G_i: jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di kabupaten *i*

Plant. F_i: jumlah petani swadaya di kabupaten *i*

- ✓ **Simluhtan 2022 (poktan) – Kementan**
- ✓ **Sutas 2018 (jumlah petani) - Kementan**



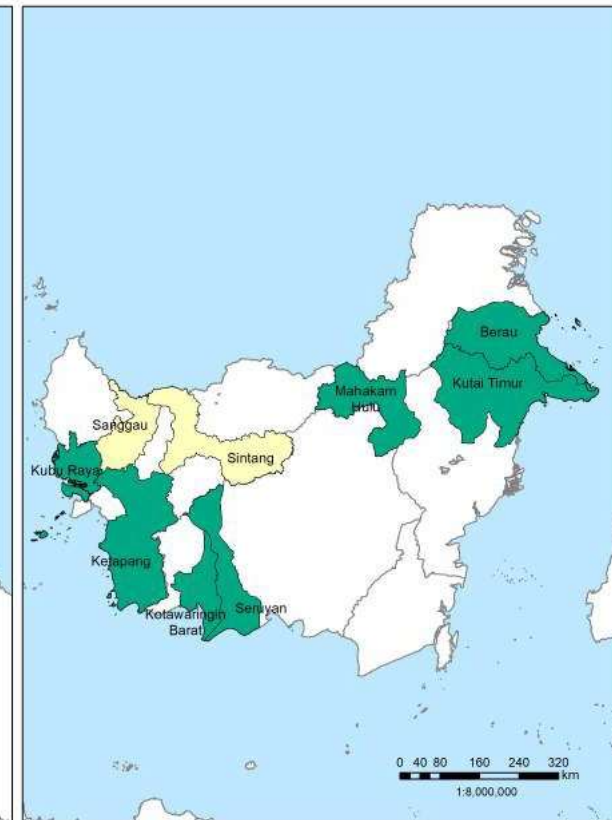
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengamati keberadaan asosiasi petani kecil, khususnya kelapa sawit di tingkat Kabupaten.

Indikator I 5: Bantuan untuk petani swadaya

$$r_{ext.agent_i} = \frac{ext.agent_i}{plant.F_i} \times 1,000$$

$ext.agent_i$: jumlah penyuluh pada kabupaten i (total).

$plant.F_i$: jumlah petani swadaya pada kabupaten i (total).

- ✓ **Simluhtan 2019 (penyuluh)**
- ✓ **Sutas 2018 (jumlah petani)**

Note:

Penyuluh lebih fokus di tanaman pangan dan hortikultura



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan bagi petani, yang salah satunya melalui penyediaan penyuluh di setiap kabupaten

Indikator I 6: Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan (khususnya minyak kelapa sawit)

$$SC_i(\%) = \frac{ISRSPO.area_i}{OP.Plantation_i} \times 100\%$$

ISRSPO.area_i: area perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten i (hektar).

OP.Plantation_i: total luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten i (hektar).

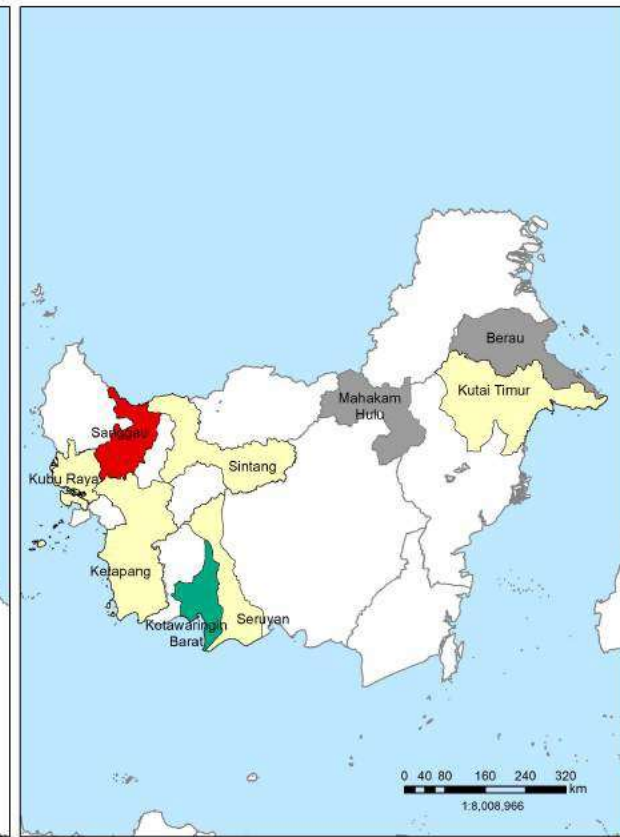
- ✓ **Statistik Perkebunan Indonesia 2019-2021 (perkebunan petani swadaya) dan 2017-2019 (perkebunan staswa dan negara) – Kementan**
- ✓ **RSPO certified oil palm – data daerah (Ketapang)**
- ✓ **RSPO certified oil palm – RSPO**
- ✓ **ISPO - data daerah**

Note: data ISPO tidak tersedia secara berkala



Nilai.

- A – Hijau: di atas rata-rata
B – Kuning: pada rata-rata
C – Merah: di bawah rata-rata
Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk memantau proporsi lahan perkebunan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan baik melalui ISPO dan/atau RSPO di dalam satu yurisdiksi.

Indikator I7:Tingkat kemiskinan

$$Poverty_i = \frac{Poor.People_i}{Population_i} \times 100\%$$

Poor. People: jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan kabupaten *i* (orang)
Population_i: total populasi di kabupaten *i* (orang).

✓ Data dan Informasi Kemiskinan 2021 -BPS



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar di suatu yurisdiksi

Indikator I8: Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan

$$bratio.LH_i = \frac{budget.LH_i}{APBD_i} \times 100\%$$

budget.LH_i: jumlah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup (rupiah).

APBD_i: jumlah total APBD kabupaten *i* (rupiah).

✓ Anggaran belanja per fungsi 2021 - Kementerian Keuangan

Note:

Di unduh dari

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk menilai komitmen pemerintah kabupaten dalam mengaktualisasikan berbagai kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Indikator I 9:Akses Informasi Publik

$$PIA_2 \in \{0,1\}$$

PIA_1 sama dengan 1 jika terdapat Perda/SK Bupati pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten i, dan 0 jika tidak.

✓ Rakapitulasi SK PPID 2020 - Kemendagri

Note:

Perlu pengukuran yang lebih sensitive ke depannya.



Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah akses publik atas informasi

Indikator 20: Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten

$$MSP_2 \in \{0,1\}$$

MSP_1 terdapat SOP untuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah di kabupaten i, dan 0 jika tidak.

- ✓ **Qanun Aceh Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun**
- ✓ **SK Pokja (Kubu Raya, Sanggau)**
- ✓ **Berita acara musrenbang (Kobar)**
- ✓ **Notulensi musrenbang (Seruyan)**
- ✓ **Apps e-musrenbang (Berau, Kutim, Mahulu)**

Note:

Perlu pengukuran yang lebih sensitive ke depannya.



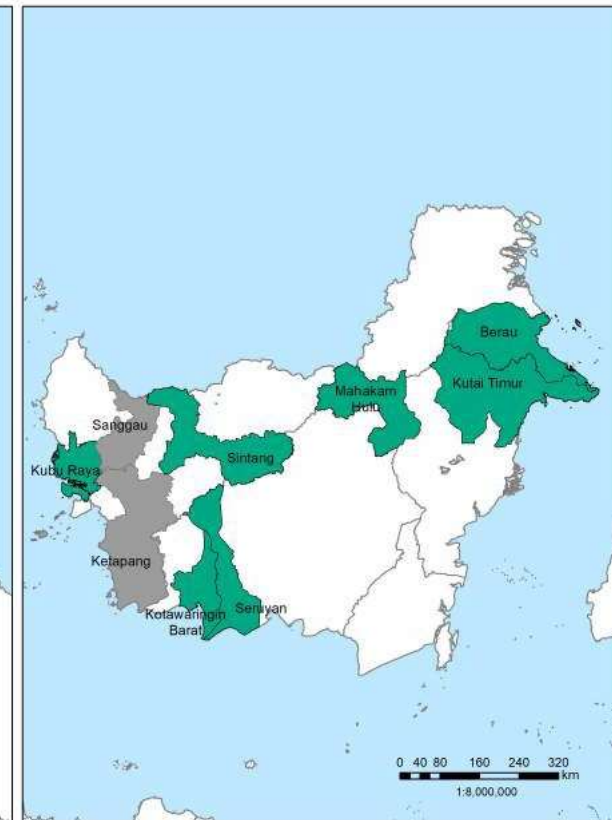
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah di dalam mengaktualisasikan kewajiban untuk melibatkan masyarakat di dalam proses perencanaan

Indikator 2I: Mekanisme pengaduan

$$I_2 \in \{0, 1\}$$

PIA_i sama dengan 1 jika terdapat mekanisme pengaduan di kabupaten i , dan 0 jika tidak.

- ✓ **SP4N Lapor (Aceh, Ketapang, Kobar)**
- ✓ **SOP pengaduan (Kubu Raya, Sintang)**
- ✓ **Aplikasi pengaduan SIPEDULI (Kutim)**
- ✓ **SOP Pengaduan pencemaran (Mahulu)**

Note:

Perlu pengukuran yang lebih sensitive ke depannya.



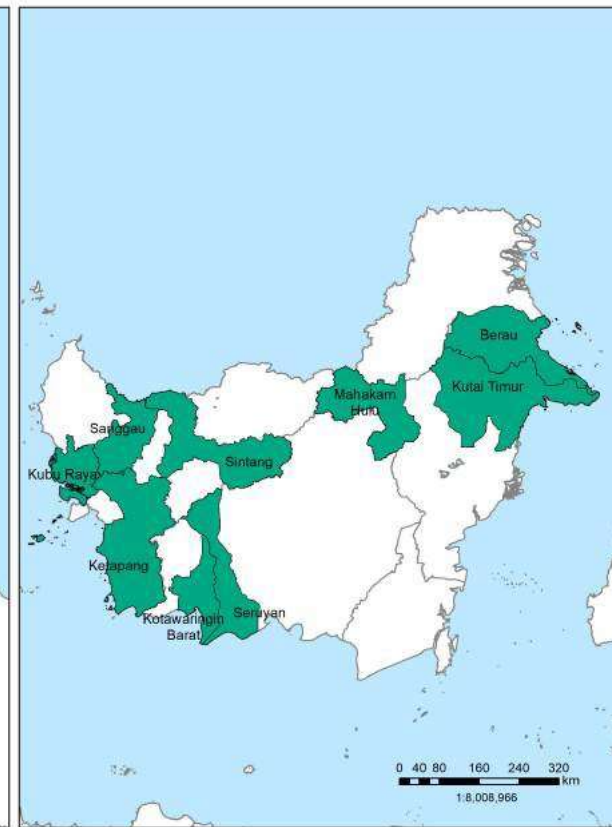
Nilai:

A – Hijau: di atas rata-rata

B – Kuning: pada rata-rata

C – Merah: di bawah rata-rata

Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menangani aduan

Indikator 22: Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan

$$SLUP_2 \in \{0,1\}$$

$SLUP_1$ sama dengan 1 jika terdapat dokumen DDDTLH atau RPPLH di kabupaten i, dan 0 jika sebaliknya.

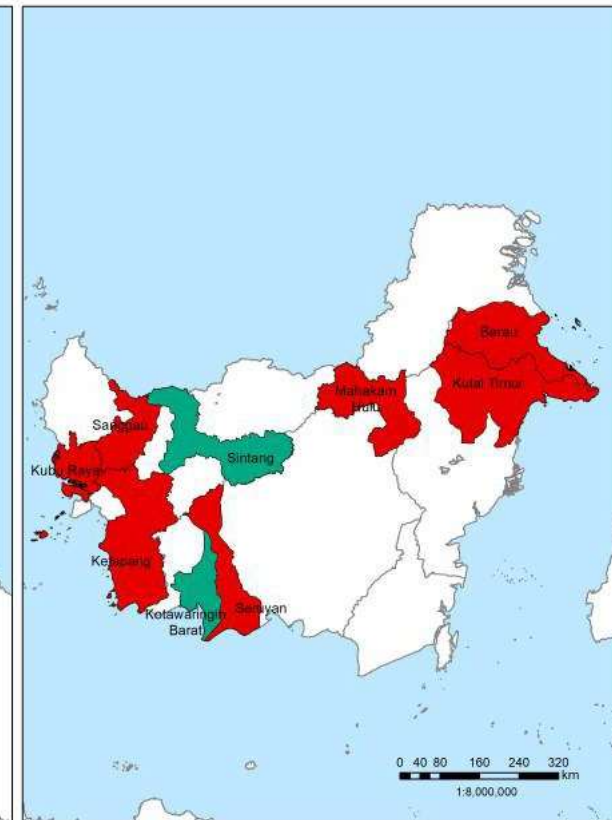
- ✓ DDDTLH (Aceh Utara, Sintang, Kobar)
- ✓ RPPLH (Aceh Timur)

• Note:
DDDTLH sedang dibantu oleh Tim Segar untuk penyusunannya.



Nilai:

- A – Hijau: di atas rata-rata
- B – Kuning: pada rata-rata
- C – Merah: di bawah rata-rata
- Abu-abu : Tidak ada data



Tujuan: untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di suatu yurisdiksi telah mengupayakan perencanaan pembangunan wilayahnya secara inklusif dan berkelanjutan

NATIONAL DATA ON INDICATOR 19
(BUDGET PROPORTION ON
SUSTAINABILITY)



Data Indikator yang Perlu Perhatian di Kabupaten Dampingan USAID SEGAR

Emisi (FREL)

- Ketersediaan FREL untuk penilaian indikator
- Pengukuran untuk sampai ke tingkat kabupaten

FPIC

- Ketersediaan data FPIC

RPPLH / DDTLH

- Hasil penilaian menunjukkan mayoritas kabupaten belum memproduksi dokumen tersebut (DDDTLH)

Registrasi Konflik

- Perlu triangulasi data untuk penentuan jumlah konflik dari data pusat dan daerah

Pengakuan Terhadap Tanah Adat

- Perlu pematangan formula penghitungan dengan mempertimbangkan luasan lahan adat, tidak hanya SK

2. Peta Jalan Implementasi Kutim

3. Persiapan Peluncuran

Pertanyaan Diskusi

Apa manfaat Terpercaya bagi Kutai Timur dalam mempromosikan komitmen dan praktek keberlanjutan di Kutai Timur?

Berdasarkan indikator Terpercaya, aspek/pilar apa yang perlu di promosikan dari Kutai Timur dan apa aspek yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan?

- Siapa telah melakukan apa?
- Target yang diharapkan pada tahun 2023 dan 2024?